

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

##### 1. Gambaran Umum Kota Blitar.

###### a. Profil Kota Blitar.

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah pemerintah kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi di kota-kota besar. Ukuran wilayah Kota Blitar tidak mencerminkan sebuah kota besar, level yang dicapai Kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual Kota Blitar sudah tidak merupakan kota kecil, tetapi juga belum menjadi kota Besar.

Membicarakan Kota Blitar, tidaklah lengkap kalau tidak menceritakan semangat kejuangan yang tumbuh berkembang dan kemudian terus menggelora serta menjiwai seluruh proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di kota ini. Kota Blitar merupakan tempat disemayamkannya Bung Karno, Sang Proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia, Idiolog dan pemikir besar dunia yang dikagumi baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Kota Blitar juga merupakan salah satu tempat bersejarah bagi Bangsa Indonesia, dimana sebelum dicetuskannya Proklamasi ditempat ini telah diserukan



kemerdekaan Indonesia yang diikuti dengan pengibaran Bendera Sang Merah Putih yang kemudian berujung pada Pemberontakan PETA (Pembela Tanah Air) oleh Soedanco Soeprijadi.

Masyarakat Kota Blitar sangat bangga sebagai pewaris Soeprijadi dan pewaris Soekarno yang nasionalistik dan patriotik. Pemerintah Kota Blitar sadar akan hal ini, semangat itu dilestarikan, dikobarkan dan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ke depan. Tidak heran kalau akronim PATRIA dipilih sebagai semboyan. Kata PATRIA ini disusun dari kata PETA, yang diambil dari kisah Soedanco Soeprijadi yang memimpin pemberontakan satuan Pembela Tanah Air (PETA) di Blitar pada jaman penjajahan Jepang, serta dari kata Tertib, Rapi, Indah, dan Aman. Selain itu, kata PATRIA memang sengaja dipilih karena di dalamnya mengandung makna “Cinta tanah air”. Sehingga dengan menyebut kaa PATRI orang akan terbayang kobaran semangat nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh para patriot bangsa yang ada di Kota Blitar.

#### **b. Letak Geografis Kota Blitar.**

Kota Blitar terletak  $\pm$  160 km sebelah barat daya Kota Surabaya ibukota Provinsi Jawa Timur dan berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Mojokerto. Terletak pada ketinggian 156 meter dari atas permukaan laut, pada koordinat  $112^{\circ}14'$  -  $112^{\circ}28'$  Bujur Timur dan  $8^{\circ}2'$  -  $8^{\circ}10'$  Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata  $24^{\circ}$  C -  $34^{\circ}$  C karena Kota Blitar terletak di kaki Gunung Kelud. Kondisi seperti itu menjadikan Kota Blitar sebagai daerah yang nyaman untuk dijadikan tempat hunian dan peristirahatan.

Secara administratif Kota Blitar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah, pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Kota Blitar dalam menggerakkan perekonomian mengandalkan potensi diluar sumber daya alam yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Dengan demikian untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di era otonomi daerah, Kota Blitar harus mampu melakukan berbagai langkah terobosan melalui pengembangan dan pembangunan sumber daya lainnya baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya buatan.

### **c. Luas Wilayah Kota Blitar.**

Kota Blitar memiliki luas wilayah kurang lebih 32,58 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi tiga kecamatan dengan luas wilayah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Sukorejo : 9,93 km<sup>2</sup>
- 2) Kecamatan Kepanjenkidul : 10,5 km<sup>2</sup>
- 3) Kecamatan Sananwetan : 12,15 km<sup>2</sup>

Dari tiga Kecamatan tersebut, terbagi menjadi 21 Kelurahan dengan masing-masing 7 Kelurahan.

**Tabel 7. Luas wilayah kelurahan di Kota Blitar.**

Kecamatan	Kelurahan	Luas wilayah (Km <sup>2</sup> )
<b>Sukorejo</b>	Tlumpu	1,0153
	Karangsari	0,8824
	Turi	0,5086
	Blitar	1,3321
	Sukorejo	1,4662
	Pakunden	2,2620
	Tanjungsari	2,4581
<b>Kepanjenkidul</b>	Kepanjenkidul	0,8670
	Kepanjenlor	0,6133
	Kauman	0,6803
	Bendo	1,5185
	Tanggung	2,2300
	Sentul	2,6830
	Ngadirejo	1,9102
<b>Sananwetan</b>	Rembang	0,8443
	Klampok	1,5307
	Plosokerep	1,2481
	Kaeang tengah	1,7954
	Sananwetan	2,1279
	Bendogerit	1,9552
	Gedog	2,6500
<b>Kota Blitar</b>		<b>32,578</b>

Sumber : Kota Blitar dalam angka tahun 2012 (BPS Kota Blitar)

#### d. Penduduk.

Untuk wilayah dengan luas hanya 32 km<sup>2</sup>, penambahan jumlah penduduk sebesar 2.082 jiwa dalam setahun atau rata-rata 174 jiwa per bulan merupakan angka yang cukup besar. Dengan angka tersebut laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar pada tahun 2012 mencapai 1,45 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Faktor pendorong kenaikan jumlah penduduk pada tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu tingkat migrasi masuk atau jumlah penduduk yang pindah ke Kota Blitar. Jumlahnya mencapai 3.700 jiwa dalam setahun, turun 29,88 persen dibandingkan tahun lalu. Sedangkan tingkat migrasi keluarnya tidak sebesar migrasi masuk, hanya 2.332 jiwa atau turun 28,9 persen dibandingkan tahun lalu.

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, tingkat kelahiran bayi di Kota Blitar terus mengalami peningkatan. Tahun ini kembali naik 3,29 persen dibandingkan tahun lalu atau 1.945 kelahiran dalam setahun. Jika dirata-rata ada sekitar 8 (delapan) kelahiran dalam sebulan di setiap kelurahan. Tingkat kematian penduduknya juga naik 0,49 persen dibandingkan tahun lalu, dari 1.234 kematian menjadi 1.240 kejadian kematian dalam setahun. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di kota Blitar hampir seimbang terlihat dari rasio jenis kelamin yang mendekati 100 yaitu 99,70 (Tabel 4.2.1).

**Tabel 8. Kelahiran, kematian, datang dan pindah per Kecamatan Kota Blitar**

Kecamatan		Kelahiran	Kematian	Peduduk Datang	Penduduk Pindah
Sukorejo		676	464	1328	716
Kepanjenkidul		508	346	1015	670
Sananwetan		761	430	1357	946
Kota Blitar	2012	1945	1240	3700	2332
	2011	1883	1234	5277	3280
	2010	1861	1169	3428	3017
	2009	1486	1184	2805	2411
	2008	1617	1119	3318	2617

Sumber : Kota Blitar dalam angka tahun 2012 (BPS Kota Blitar)

Meskipun jumlah penduduk Kecamatan Sananwetan adalah yang terbesar namun tingkat kepadatan penduduknya masih dibawah Kecamatan Sukorejo. Pada tahun 2012 tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Sukorejo mencapai 4.966 jiwa/km<sup>2</sup> atau hampir mencapai 5 orang/m<sup>2</sup>, sedangkan tingkat kepadatan Kecamatan Sananwetan sedikit dibawahnya yaitu 4.490 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Blitar pada tahun 2012 mencapai 4.460 jiwa / Km<sup>2</sup> atau sekitar 4 orang/m<sup>2</sup> (Tabel 4.2.2). Adapun kelurahan dengan penduduk terpadat adalah Kelurahan Sukorejo dengan tingkat kepadatan mencapai 9.839 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 9. Luas wilayah, Kepala keluarga, kepadatan, dan rata-rata penduduk per Kepala keluarga**

Kecamatan		Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepala Keluarga	Kepadatan	Rata-rata penduduk per KK
Sukorejo		9,92	14.789	5965,74	3,33
Kepanjenkidul		10,50	12.681	3947,14	3,27
Sananwetan		12,15	15.967	4490,19	3,42
Kota Blitar	2012	32,58	43.437	4460,00	3,34
	2011	32,58	42.765	4.396,09	3,16
	2010	32,58	39.427	4.314,93	3,57
	2009	32,58	36.217	4.281,07	3,85
	2008	32,58	42.847	4.092,91	3,26

Sumber : Kota Blitar dalam angka tahun 2012 (BPS Kota Blitar)

#### e. Pemerintahan Daerah.

Kota Blitar dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota. Kota Blitar memiliki Visi dan Misi serta Sapta program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Blitar sebagai berikut:

##### a) Visi Pemerintah Kota Blitar

“Menuju masyarakat Kota Blitar sejahtera yang berkeadilan dan religius melalui APBD pro rakyat pada tahun 2015”. Adapun makna visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

- 2) Berkeadilan merupakan suatu sikap dan tindakan yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya serta memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Dengan demikian proses pembangunan harus memperhatikan asas pemerataan sehingga manfaat dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Religius adalah kondisi masyarakat yang menjunjung norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama sebagai landasan moral dan etika yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) APBD Pro Rakyat mengandung makna bahwa APBD Kota Blitar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

b) Misi Pemerintah Kota Blitar.

Adapun misi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengandung makna bahwa keseluruhan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan didasarkan pada fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika serta diarahkan pada terwujudnya suatu tatanan sosial masyarakat yang memiliki karakter Nasionalis-Religius sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama, nasionalisme dan kearifan lokal.
- 2) Meningkatkan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada hakekatnya sistem pendidikan dan pelayanan

kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan sehingga akan tercapai derajat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik.

- 3) Menetapkan pelaksanaan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan. Mengandung makna bahwa pembangunan perekonomian daerah dilaksanakan dengan mengembangkan potensi ekonomi terutama di bidang pariwisata, perdagangan dan jasa harus berpihak kepada masyarakat menengah dan miskin dengan menitikberatkan pengembangan sektor koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta pelaku usaha informal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi segala macam kebutuhannya.
- 4) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasar prinsip-prinsip otonomi daerah. Proses pembangunan yang dilaksanakan di Kota Blitar harus mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang didukung oleh aparatur profesional dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

c) Sapta Program Prioritas

Kota Blitar menetapkan program prioritas sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan sekolah sebagai basis pendidikan masyarakat dan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Pengembangan ekonomi lokal dengan titik berat kepada pemberdayaan pelaku ekonomi mikro, terutama kalangan pengusaha kecil dan menengah sebagai prasyarat perwujudan Kota Blitar sebagai kota perdagangan dan jasa.
- 3) Peningkatan semangat kejuangan dan cinta tanah air yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai prasyarat perwujudan Blitar sebagai Kota PATRIA.
- 4) Peningkatan kualitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mengedepankan cara-cara persusif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 5) Peningkatan kualitas kebersihan kota dan penataan lingkungan hidup menuju kota Blitar sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali dan menarik untuk dikunjungi.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan prima pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai muara dari proses reformasi dan reformasi pembangunan kota.
- 7) Peningkatan kualitas penerapan tata ruang kota untuk mengantisipasi perkembangan wilayah pembangunan regional, nasional dan global.

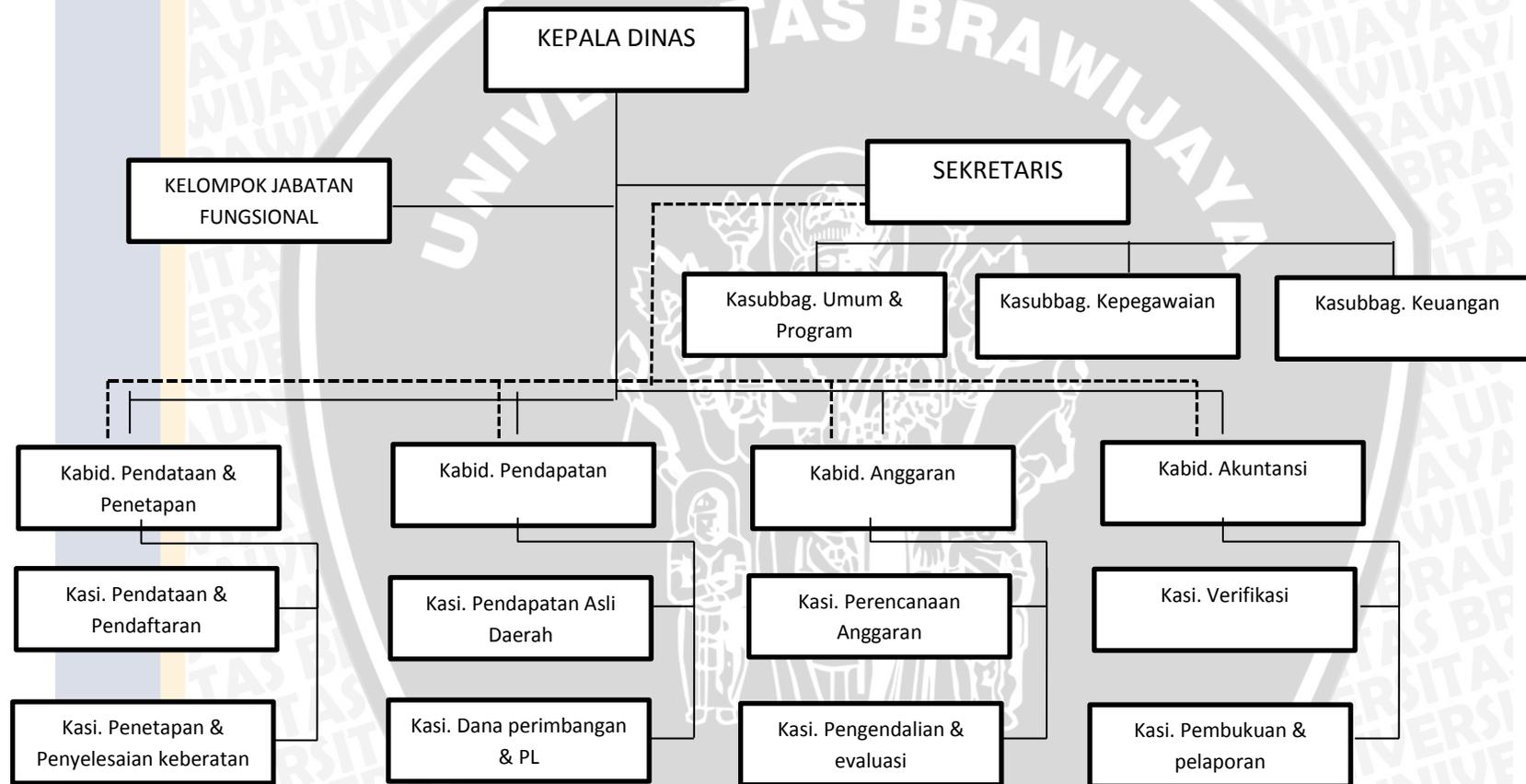
## **2. Gambaran Umum Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.**

### **a. Sejarah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.**

Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dibentuk sebagai wujud upaya pelaksanaan otonomi daerah yang baik pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Blitar No. 14 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah. Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagai salah satu lembaga publik yang menjadi kunci pengelolaan keuangan di Pemerintahan Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas operasional Pemerintah Daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Pengelola Keuangan Daerah juga sebagai bagian dari sistem pemerintahan Kota Blitar bertekad untuk menjawab tantangan tersebut dengan menciptakan dan menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta siap untuk mengembangkan/meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Dengan tekad dan terus menerus berupaya untuk menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, sebagai implikasi atas perubahan yang besar dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut kesiapan daerah baik secara kelembagaan ataupun personil dalam mengelola perubahan manajemen keuangan.

**b. Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar.**



**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar**

### c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota

#### Blitar.

Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Kota Blitar. Dengan mekanisme berupa pemungutan pajak dan retribusi daerah kemudian melakukan pengelolaan keuangan yang baik dengan mengembangkan sumber penerimaan yang potensial di Kota Blitar untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari kinerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar adalah pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah seperti kebutuhan belanja daerah dan pembangunan daerah Kota Blitar. Selain itu DPKD juga membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk periode berikutnya yang kemudian diajukan pada DPRD dan Walikota untuk mendapat pengesahan menjadi APBD hasil yang lain adalah penyusunan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagai berikut:

#### 1. Kepala Dinas

Bertugas sebagai kepala dinas pengelola keuangan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja dinas pengelola keuangan daerah.

## 2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta menyelenggarakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, urusan umum dan program.

Sekretariat terdiri dari :

### a) Sub Bagian Umum dan Program

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, pengelolaan dan pengawasan sarana prasarana, serta penyusunan program dan pelaporan.

### b) Sub. Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai.

### c) Sub. Bagian Keuangan.

Mempunyai tugas menyusun rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung, dan pengelolaan keuangan.

## 3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian pendataan, pendaftaran, pengolahan data, pemeriksaan penetapan, pendapatan daerah.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

### a) Kasi Pendataan dan Pendaftaran

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan pengendalian pendataan dan pendaftaran potensi subyek / obyek pendapatan daerah.

b) Kasi Penetapan dan penyelesaian keberatan

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian perhitungan dan penetapan besarnya pungutan daerah serta penyelesaian keberatan dan penetapan pungutan

4. Bidang Pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, peningkatan sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya.

Bidang Pendapatan terdiri dari :

a) Kasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bimbingan teknis, pengendalian dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah.

b) Kasi dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dana perimbangan dan pendapatan lainnya.

5. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rancangan perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bidang Anggaran terdiri dari :

a) Kasi Perencanaan Anggaran

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rancangan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b) Kasi Pengendalian dan Evaluasi

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka pengendalian evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta pegesahannya.

6. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan , pembukuan dan verifikasi pelaksanaan anggaran serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pegesahannya, pembinaan dan perbendaharaan dan tata usaha keuangan.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

a) Kasi Verifikasi

Mempunyai tugas mengadakan uji kebenaran laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan membina ketatausahaan keuangan.

b) Kasi Pembukuan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan secara sistematis dan terinci pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian terhadap realisasi pendapatan dan belanja administrasi umum serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **d. Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar.**

##### **a) Visi**

Dinas Pengelola Keuangan Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah Kota Blitar yang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Pengelola Keuangan Daerah dan pendapatan asli daerah serta perolehan dana lainnya, mempunyai peran penting untuk mengawal dan sebagai pendukung demi suksesnya pemerintahan dan pembangunan di kota Blitar menetapkan visi sebagai berikut:

”TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL”.

Visi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar diangkat dari fenomena otonomi daerah yang berbasiskan pada keunggulan pencapaian kinerja yang obyektif dan logis berdasarkan sumber daya analisa lingkup internal dan eksternal. Dengan visi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi semangat bagi aparat DPKD Kota Blitar untuk meningkatkan dan mewujudkan daya kreatifitasnya serta kinerjanya secara optimal untuk organisasi yang lebih baik eksis dan berperan penting bagi proses pembangunan daerah.

##### **b) Misi**

Dengan mengacu pada visi yang ditetapkan, maka Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan terhadap potensi dan sumber-sumber PAD secara komprehensif, valid dan akurat.
2. Mengkoordinasikan, menetapkan dan menyelesaikan keberatan atas penetapan sumber-sumber PAD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan potensi riil yang obyektif.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan PAD dan sumber-sumber pendapatan lainnya secara kontinyu dan sinergi.
4. Menyusun program dan rencana pengembangan pengelolaan PAD menuju kapasitas potensial.
5. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana APBD dan PAPBD beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yang akomodatif, aspiratif sesuai dokumen perencanaan daerah.
6. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan APBD agar dapat berjalan secara tertib, disiplin, taat azas, dan terarah sesuai yang direncanakan.
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan serta perbendaharaan penerimaan dan pengeluaran anggaran secara tertib dan komprehensif.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran dan perhitungan gaji pegawai.
9. Menyusun laporan perhitungan APBD yang komprehensif dan akuntabel.

Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan internal agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

### **B. Penyajian Data.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayah daerah yang bersangkutan dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengelola dan membiayai urusan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Blitar perlu mengetahui sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial dan kurang potensial, hal ini ditujukan agar pemerintah dapat memfokuskan perhatiannya pada sumber pendapatan asli daerah yang potensial dan berusaha untuk menggali lebih lanjut potensi yang dimiliki. Sedangkan untuk sumber pendapatan asli daerah yang kurang potensial, pemerintah harus melakukan koreksi, evaluasi dan pendataan serta mengkaji lebih lanjut untuk dapat meningkatkan potensi sumber pendapatan asli daerah yang kurang tersebut.

Pada tabel 10 dapat dilihat data target dan realisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012. Berdasarkan tabel tersebut sumber pendapatan asli daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 terbesar diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada sumber pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tersebut adalah terjadi pengurangan pada retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak masuk dalam retribusi jasa umum tetapi masuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 10 bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah terbesar diperoleh dari sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pada tabel 11 dapat dilihat rincian penerimaan dari jenis-jenis retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012, dari tabel tersebut dapat terlihat jelas bahwa terdapat penurunan penerimaan yang cukup besar pada retribusi jasa umum dikarenakan adanya pengurangan sumber penerimaan pada retribusi jasa umum tersebut.

Selama periode 2008-2012 penerimaan retribusi daerah Kota Blitar dari jenis retribusi jasa umum mengalami fluktuasi dikarenakan adanya pengurangan sumber penerimaan berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pada jenis retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu cenderung stabil selama 5 tahun terakhir. Untuk lebih memperjelas penyajian data, maka disajikan tabel 10 tentang target dan realisasi sumber-sumber penerimaan asli daerah Kota Blita selama periode 2008-2012 dan tabel 11 tentang target dan realisasi jenis-jenis retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 sebagai berikut:

**Tabel 10. Target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Keterangan	Sumber pendapatan asli daerah				Pendapatan asli daerah (Rp)
		Pajak Daerah (Rp)	Retribusi daerah (Rp)	Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (Rp)	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Rp)	
2008	Target	3.264.458.400	20.731.931.084	354.100.454	15.364.796.383	<b>39.715.286.321</b>
	Realisasi	3.706.208.387	20.563.760.214	354.100.454	16.185.839.384	<b>40.809.908.439</b>
2009	Target	3.478.342.000	21.815.573.505	414.056.025	7.733.711.454	<b>33.441.682.984</b>
	Realisasi	4.038.997.939	24.234.935.749	414.056.027	11.172.852.531	<b>39.860.842.246</b>
2010	Target	4.123.976.125	7.117.676.800	466.678.300	35.148.158.999	<b>46.856.490.224</b>
	Realisasi	4.858.472.679	6.649.853.795	466.678.300	35.715.970.001	<b>47.690.974.775</b>
2011	Target	8.152.343.700	7.031.900.763	466.678.300	38.367.606.448	<b>54.018.529.211</b>
	Realisasi	10.533.996.120	6.687.731.370	808.704.595	34.567.637.622	<b>52.598.069.707</b>
2012	Target	8.651.257.425	7.662.957.438	949.883.434	38.702.407.717	<b>55.966.506.014</b>
	Realisasi	11.156.119.479	6.899.399.102	949.883.434	44.616.241.024	<b>63.621.643.039</b>

Sumber: DPKD Kota Blitar (data diolah)

**Tabel 11. Target dan realisasi retribusi daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Keterangan	Jenis Retribusi			Retribusi Daerah (Rp)
		Retribusi Jasa Umum (Rp)	Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	
2008	Target	17.280.497.534	3.275.355.350	176.078.200	<b>20.731.931.084</b>
	Realisasi	17.271.416.026	3.089.637.151	202.707.037	<b>20.563.760.214</b>
2009	Target	17.960.779.505	3.654.498.800	200.295.200	<b>21.815.573.505</b>
	Realisasi	20.503.941.820	3.455.901.268	275.092.661	<b>24.234.935.749</b>
2010	Target	3.128.161.000	3.814.019.000	175.476.800	<b>7.117.676.800</b>
	Realisasi	3.019.313.690	3.334.142.880	296.397.225	<b>6.649.853.795</b>
2011	Target	3.002.070.700	3.840.502.413	189.327.650	<b>7.031.900.763</b>
	Realisasi	2.881.957.636	3.503.895.127	301.878.607	<b>6.687.731.370</b>
2012	Target	3.491.631.050	4.034.897.938	136.428.450	<b>7.662.957.438</b>
	Realisasi	3.190.200.444	3.412.770.377	296.428.281	<b>6.899.399.102</b>

Sumber: DPKD Kota Blitar (data diolah)

### C. Analisis data dan Interpretasi

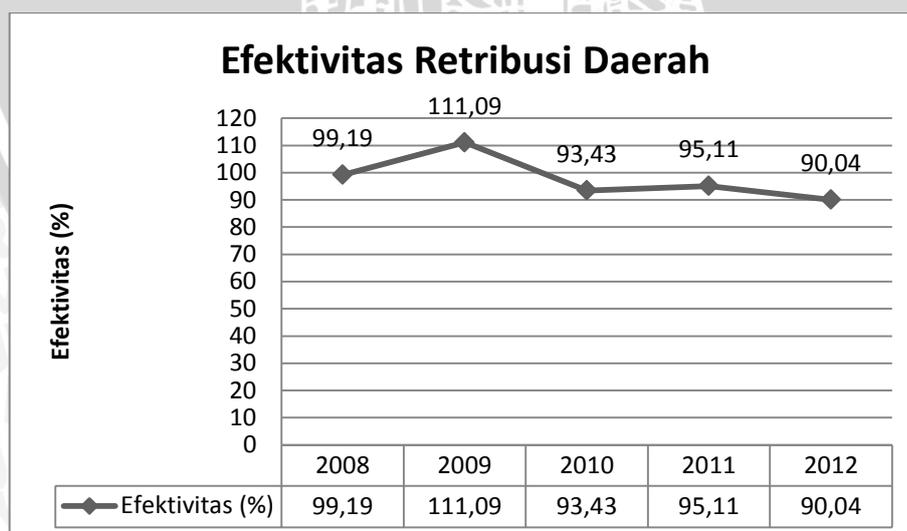
#### 1. Efektivitas penerimaan retribusi daerah dan masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar periode tahun 2008-2012.

Data efektifitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dan grafik persentase sebagai berikut:

**Tabel 12. Efektivitas retribusi daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Target retribusi daerah (Rp)	Realisasi retribusi daerah (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2008	20.731.931.084	20.563.760.214	99,19	<b>Efektif</b>
2009	21.815.573.505	24.234.935.749	111,09	<b>Sangat Efektif</b>
2010	7.117.676.800	6.649.853.795	93,43	<b>Efektif</b>
2011	7.031.900.763	6.687.731.370	95,11	<b>Efektif</b>
2012	7.662.957.438	6.899.399.102	90,04	<b>Efektif</b>

Sumber: Data diolah



**Gambar 2. Grafik persentase efektivitas retribusi daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Berdasarkan tabel 12 dan grafik persentase efektivitas pada gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa persentase efektivitas retribusi daerah Kota Blitar periode 2008-2012 mengalami fluktuasi. Tahun 2008 dapat dilihat persentase sebesar 99,19% dengan kriteria efektif, dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi sangat efektif sebesar 111,09%. Tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami penurunan persentase efektivitas menjadi sebesar 93,43% pada tahun 2010, meskipun pada tahun 2011 persentase mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,11%, akan tetapi realisasi penerimaan belum dapat mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2012 persentase mengalami penurunan kembali menjadi 90,04% dengan kriteria efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan efektivitas penerimaan retribusi daerah baik kinerja pemerintah daerah maupun kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi agar realisasi dapat mencapai target yang ditentukan dan dapat mencapai kriteria sangat efektif, sehingga penerimaan pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat.

Efektivitas retribusi daerah merupakan ukuran seberapa besar tingkat keberhasilan realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai target atau tujuan yang seharusnya dicapai. Penerimaan dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase yang dicapai melebihi 100% atau realisasi melebihi target yang telah ditentukan. Besar kecilnya jumlah penerimaan retribusi daerah Kota Blitar dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penerimaan jenis-jenis retribusi daerah Kota Blitar. Retribusi daerah Kota Blitar sendiri dibagi menjadi 3 jenis retribusi antara lain retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Berikut data persentase efektivitas penerimaan tiap-tiap jenis retribusi daerah Kota Blitar:

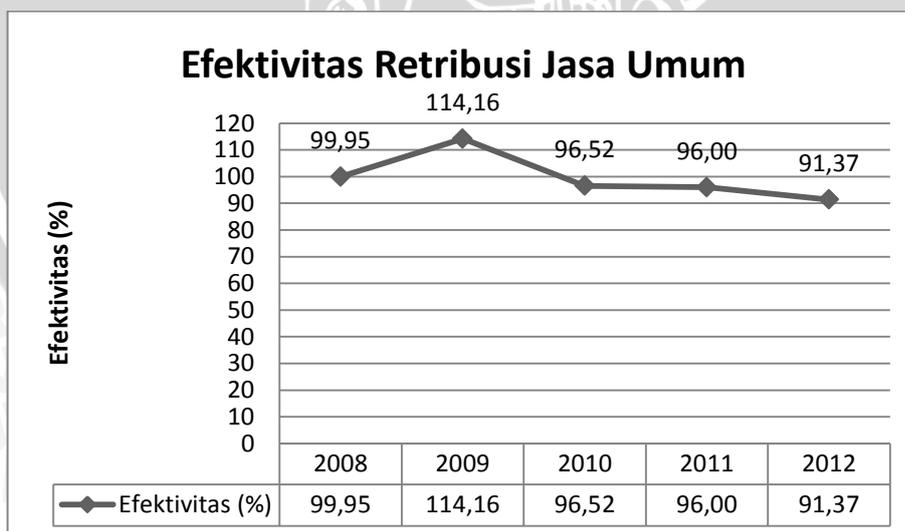
**a. Efektivitas penerimaan retribusi jasa umum Kota Blitar periode tahun 2008-2012.**

Data efektifitas penerimaan retribusi jasa umum Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dan grafik persentase sebagai berikut:

**Tabel 13. Efektivitas penerimaan retribusi jasa umum Kota blitar periode 2008-2012**

Tahun	Target Retribusi Jasa Umum (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2008	17.280.497.534	17.271.416.026	99,95	<b>Efektif</b>
2009	17.960.779.505	20.503.941.820	114,16	<b>Sangat Efektif</b>
2010	3.128.161.000	3.019.313.690	96,52	<b>Efektif</b>
2011	3.002.070.700	2.881.957.636	96,00	<b>Efektif</b>
2012	3.491.631.050	3.190.200.444	91,37	<b>Efektif</b>

Sumber: Data diolah



**Gambar 3. Grafik persentase efektifitas retribusi jasa umum Kota Blitar periode 2008-2012**

Berdasarkan tabel 13 dan grafik persentase efektivitas pada gambar 3 dapat dilihat bahwa persentase efektivitas penerimaan retribusi jasa umum selama periode 2008-2012 mengalami fluktuasi. Persentase efektivitas penerimaan retribusi jasa umum tertinggi selama periode 2008-2012 diperoleh pada tahun 2009 sebesar 114,16%. Pada tahun 2012 persentase efektivitas penerimaan retribusi jasa umum mengalami penurunan dan merupakan persentase terendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,37%, akan tetapi persentase penerimaan retribusi tersebut masih dikatakan sebagai efektif.

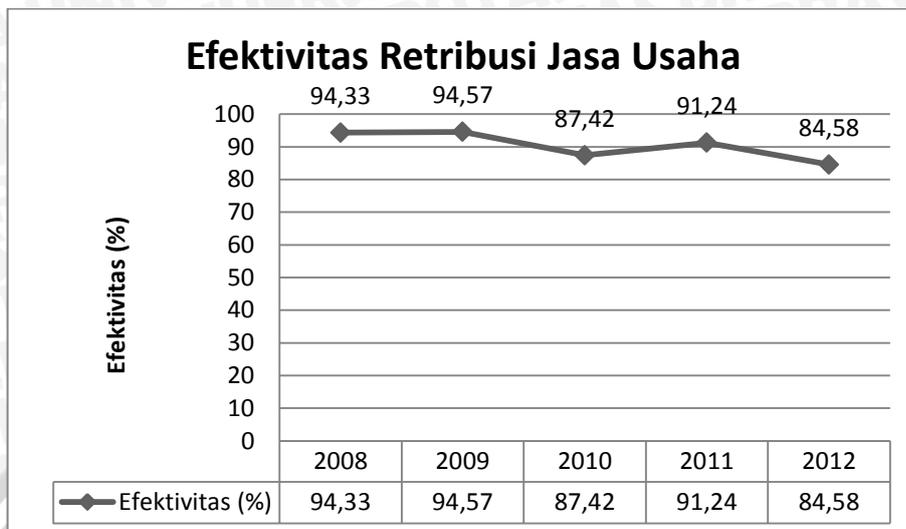
#### **b. Efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha Kota Blitar periode tahun 2008-2012.**

Data efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dan grafik persentase sebagai berikut:

**Tabel 14. Efektivitas retribusi jasa usaha Kota Blitar periode 2008-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Target Retribusi Jasa Usaha (Rp)</b>	<b>Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)</b>	<b>Efektivitas (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2008	3.275.355.350	3.089.637.151	94,33	<b>Efektif</b>
2009	3.654.498.800	3.455.901.268	94,57	<b>Efektif</b>
2010	3.814.019.000	3.334.142.880	87,42	<b>Cukup Efektif</b>
2011	3.840.502.413	3.503.895.127	91,24	<b>Efektif</b>
2012	4.034.897.938	3.412.770.377	84,58	<b>Cukup Efektif</b>

Sumber: Data diolah



**Gambar 4. Grafik persentase efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha Kota Blitar periode 2008-2012**

Berdasarkan tabel 14 dan grafik persentase efektivitas pada gambar 4 dapat dilihat bahwa persentase efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha selama periode 2008-2012 juga mengalami fluktuasi. Persentase efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha selama periode 2008-2012 diperoleh pada tahun 2009 sebesar 94,57% dengan kriteria efektif dan persentase terendah diperoleh pada tahun 2012 84,58% dengan kriteria cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha agar pada tahun berikutnya agar dapat mencapai target yang ditentukan dengan kriteria sangat efektif.

**c. Efektivitas penerimaan retribusi perizinan tertentu Kota Blitar periode tahun 2008-2012.**

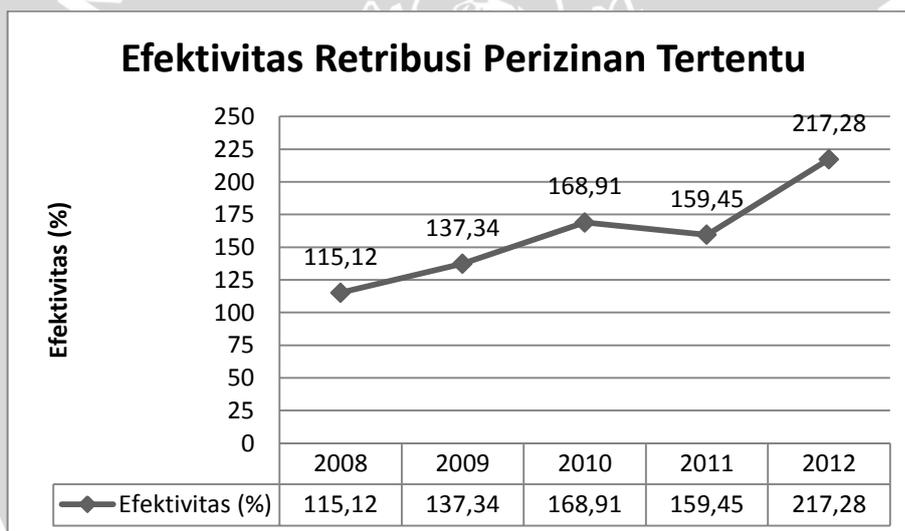
Data efektifitas penerimaan retribusi perizinan tertentu Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dan grafik persentase sebagai berikut:



**Tabel 15. Efektivitas penerimaan retribusi perizinan tertentu Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Target Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2008	176.078.200	202.707.037	115,12	Sangat Efektif
2009	200.295.200	275.092.661	137,34	Sangat Efektif
2010	175.476.800	296.397.225	168,91	Sangat Efektif
2011	189.327.650	301.878.607	159,45	Sangat Efektif
2012	136.428.450	296.428.281	217,28	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah



**Gambar 5. Grafik persentase efektivitas retribusi perizinan tertentu Kota blitar periode 2008-2012**

Berdasarkan tabel 15 dan grafik persentase efektivitas pada gambar 5 dapat dilihat bahwa persentase efektivitas penerimaan retribusi selama periode 2008-2012 selalu mengalami peningkatan. Persentase penerimaan retribusi perizinan tertentu selama periode 2008-2012 sudah mencapai kriteria sangat efektif, dengan persentase tertinggi diperoleh pada tahun 2012 sebesar 217,28%. Hal ini dapat

menjadi pedoman bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan efektivitas penerimaan retribusi perizinan tersebut.

Efektivitas penerimaan retribusi daerah baik melalui kinerja pemerintah daerah maupun tingkat kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi perlu lebih ditingkatkan. Penerimaan dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase yang dicapai melebihi 100% atau realisasi melebihi target yang telah ditentukan. Tidak hanya pada jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha saja, akan tetapi pada jenis retribusi perizinan tertentu yang sudah mencapai kriteria sangat efektif juga perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar realisasi penerimaan retribusi daerah dapat mencapai target yang telah ditentukan dan dapat mencapai kriteria sangat efektif secara keseluruhan guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

## 2. Laju pertumbuhan retribusi daerah dan masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar periode tahun 2008-2012.

Data laju pertumbuhan retribusi daerah Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 16. Laju pertumbuhan retribusi daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Target retribusi daerah (Rp)	Realisasi retribusi daerah (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan %
2008	20.731.931.084	20.563.760.214	-	-
2009	21.815.573.505	24.234.935.749	3.671.175.535	<b>17,85</b>
2010	7.117.676.800	6.649.853.795	-17.585.081.954	<b>-72,56</b>
2011	7.031.900.763	6.687.731.370	37.877.575	<b>0,57</b>
2012	7.662.957.438	6.899.399.102	211.667.732	<b>3,17</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa tingkat persentase laju pertumbuhan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 persentase laju pertumbuhan mengalami penurunan drastis sebesar 72,56%. Penurunan yang drastis pada penerimaan retribusi daerah tahun 2010 dikarenakan pada tahun 2010 tersebut retribusi pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak masuk dalam retribusi jasa umum tetapi masuk dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala bidang pendapatan Bapak Hari Wahyudi, sebagai berikut:

“Pada tahun 2010 retribusi daerah mengalami penurunan yang besar hingga lebih dari 50%, khususnya pada retribusi jasa umum. Hal ini dikarenakan retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya masuk pada retribusi jasa umum, sekarang masuk pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.”

Pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami peningkatan persentase laju pertumbuhan sebesar 0,57% pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 sebesar 3,17%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengurangan terhadap jenis retribusi daerah khususnya jenis retribusi jasa umum, persentase laju pertumbuhan masih mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar pertumbuhan retribusi daerah dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Persentase kenaikan dan penurunan laju pertumbuhan retribusi daerah dipengaruhi oleh laju pertumbuhan tiap-tiap jenis retribusi daerah. Masing-masing tiap jenis retribusi daerah memiliki tingkat persentase laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Data laju pertumbuhan tiap-tiap jenis retribusi daerah Kota Blitar periode 2008-2012 adalah sebagai berikut:

**a. Laju pertumbuhan retribusi jasa umum Kota Blitar periode 2008-2012.**

Data laju pertumbuhan retribusi jasa umum Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 17. Laju pertumbuhan retribusi jasa umum Kota Blitar periode 2008-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Target Retribusi Jasa Umum (Rp)</b>	<b>Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)</b>	<b>Kenaikan/Penurunan (Rp)</b>	<b>Laju Pertumbuhan %</b>
2008	17.280.497.534	17.271.416.026	-	-
2009	17.960.779.505	20.503.941.820	3.232.525.794	<b>18,72</b>
2010	3.128.161.000	3.019.313.690	-17.484.628.130	<b>-85,27</b>
2011	3.002.070.700	2.881.957.636	-137.356.054	<b>-4,55</b>
2012	3.491.631.050	3.190.200.444	308.242.808	<b>10,70</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan retribusi jasa umum periode 2008-2012 mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan jenis retribusi pada retribusi jasa umum sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2012 persentase laju pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 10,7% dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan agar penerimaan retribusi jasa umum dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

**b. Laju pertumbuhan retribusi jasa usaha Kota Blitar periode 2008-2012.**

Data laju pertumbuhan retribusi jasa usaha Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 18. Laju pertumbuhan jasa usaha Kota Blitar periode 2008-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Target Retribusi Jasa Usaha (Rp)</b>	<b>Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)</b>	<b>Kenaikan/Penurunan (Rp)</b>	<b>Laju Pertumbuhan %</b>
2008	3.275.355.350	3.089.637.151	-	-
2009	3.654.498.800	3.455.901.268	366.264.117	<b>11,85</b>
2010	3.814.019.000	3.334.142.880	-121.758.388	<b>-3,52</b>
2011	3.840.502.413	3.503.895.127	169.752.247	<b>5,09</b>
2012	4.034.897.938	3.412.770.377	-91.124.750	<b>-2,60</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 18 dapat dilihat laju pertumbuhan retribusi jasa usaha selama periode 2008-2012 mengalami fluktuasi, tetapi berbeda dengan retribusi jasa umum yang mengalami penurunan drastis pada tahun 2010. Persentase laju pertumbuhan retribusi jasa usaha mengalami penurunan sebesar 3,52% pada tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 5,09% dan pada tahun 2012 persentase kembali mengalami penurunan sebesar 2,6%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk mengoptimalkan laju pertumbuhan agar persentase laju pertumbuhan dapat meningkat pada tahun berikutnya dan melebihi tahun-tahun sebelumnya.

### **c. Laju pertumbuhan retribusi perizinan tertentu Kota Blitar periode 2008-2012.**

Data laju pertumbuhan retribusi perizinan tertentu Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 19. Laju pertumbuhan retribusi perizinan tertentu Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Target Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan %
2008	176.078.200	202.707.037	-	-
2009	200.295.200	275.092.661	72.385.624	<b>35,71</b>
2010	175.476.800	296.397.225	21.304.564	<b>7,74</b>
2011	189.327.650	301.878.607	5.481.382	<b>1,85</b>
2012	136.428.450	296.428.281	-5.450.326	<b>-1,81</b>

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 19 dapat dilihat persentase laju pertumbuhan retribusi perizinan tertentu selama periode 2008-2012 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 35,71%. Pada tahun 2010 dan tahun 2011 masih mengalami peningkatan tetapi lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 7,74% pada tahun 2010 dan 1,85% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 persentase laju pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,81%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengawasan dan pengelolaan yang lebih ditingkatkan agar persentase laju pertumbuhan dapat mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Persentase laju pertumbuhan retribusi daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Hal ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola dan meningkatkan penerimaan retribusi pada seluruh jenis-jenis retribusi daerah agar lebih optimal sehingga persentase laju pertumbuhan dapat meningkat pada tahun berikutnya dan melebihi tahun-tahun sebelumnya.

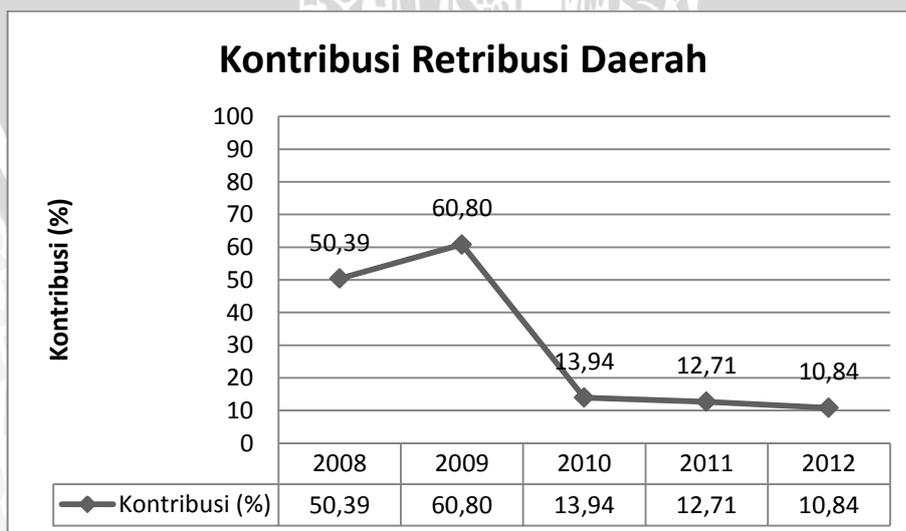
**3. Kontribusi retribusi daerah dan masing-masing jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode tahun 2008-2012.**

Data kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dan grafik persentase sebagai berikut:

**Tabel 20. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Realisasi pendapatan asli daerah (Rp)	Realisasi retribusi daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2008	40.809.908.439	20.563.760.214	50,39	Sangat Baik
2009	39.860.842.246	24.234.935.749	60,80	Sangat Baik
2010	47.690.974.775	6.649.853.795	13,94	Sangat Kurang
2011	52.598.069.707	6.687.731.370	12,71	Sangat Kurang
2012	63.621.643.039	6.899.399.102	10,84	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah



**Gambar 6. Grafik persentase kontribusi retribusi daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Berdasarkan tabel 20 dan grafik persentase kontribusi retribusi daerah pada gambar 6 tersebut dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012 mengalami fluktuasi. Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 60,8%. Pada tahun 2010 sampai 2012 persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah cenderung menurun, yaitu sebesar 13,94% pada tahun 2010, pada tahun 2011 sebesar 12,71% dan pada tahun 2012 sebesar 10,84% dengan kriteria sangat kurang pada 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan retribusi daerah selama tahun 2010-2012 belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar.

Penurunan tersebut dikarenakan adanya pengurangan jenis retribusi daerah pada jenis retribusi jasa umum sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Persentase kontribusi retribusi daerah merupakan ukuran seberapa besar sumbangan atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah dan tingkat kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi perlu ditingkatkan khususnya dalam hal penerimaan retribusi daerah agar kontribusi retribusi daerah dapat meningkat dan dapat dirasakan guna memenuhi kepentingan daerah khususnya Kota Blitar.

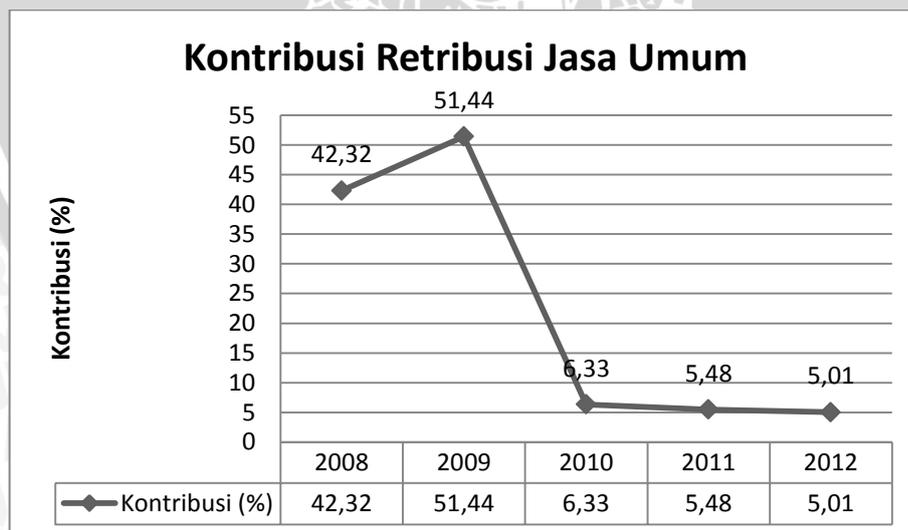
**a. Kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode tahun 2008-2012.**

Data kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dan grafik persentase sebagai berikut:

**Tabel 21. Kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)	Realisasi pendapatan asli daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2008	17.271.416.026	40.809.908.439	42,32	Baik
2009	20.503.941.820	39.860.842.246	51,44	Sangat Baik
2010	3.019.313.690	47.690.974.775	6,33	Sangat Kurang
2011	2.881.957.636	52.598.069.707	5,48	Sangat Kurang
2012	3.190.200.444	63.621.643.039	5,01	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah



**Gambar 7. Grafik persentase kontribusi retribusi jasa umum Kota Blitar periode 2008-2012.**

Berdasarkan tabel 21 dan grafik persentase kontribusi retribusi pada gambar 7 tersebut dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012 mengalami fluktuasi. Persentase kontribusi retribusi jasa umum tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 51,44%. Pada tahun 2010-2012 persentase kontribusi mengalami penurunan dan tingkat persentase kontribusi terendah pada tahun 2012 sebesar 5,01%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi jasa umum selama 3 tahun terakhir kurang memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah daripada 2 tahun sebelumnya, sehingga penerimaan retribusi jasa umum perlu ditingkatkan guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

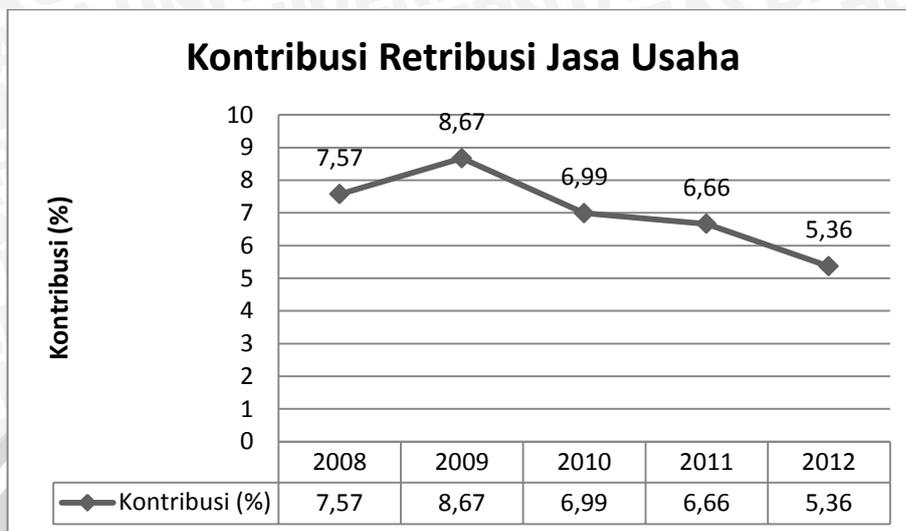
**b. Kontribusi retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode tahun 2008-2012.**

Data kontribusi retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dan grafik persentase sebagai berikut:

**Tabel 22. Kontribusi retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Realisasi pendapatan asli daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2008	3.089.637.151	40.809.908.439	7,57	Sangat Kurang
2009	3.455.901.268	39.860.842.246	8,67	Sangat Kurang
2010	3.334.142.880	47.690.974.775	6,99	Sangat Kurang
2011	3.503.895.127	52.598.069.707	6,66	Sangat Kurang
2012	3.412.770.377	63.621.643.039	5,36	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah



**Gambar 8. Grafik persentase kontribusi retribusi jasa usaha Kota Blitar periode 2008-2012**

Berdasarkan tabel 22 dan grafik persentase kontribusi retribusi pada gambar 8 tersebut dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012 juga mengalami fluktuasi. Sama halnya dengan kontribusi retribusi jasa umum, persentase kontribusi retribusi jasa usaha tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 8,67%. Pada tahun 2010-2012 persentase kontribusi cenderung menurun dengan tingkat persentase kontribusi terendah pada tahun 2012 sebesar 5,31%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi jasa usaha kurang dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sehingga penerimaan retribusi jasa usaha perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah khususnya Kota Blitar.

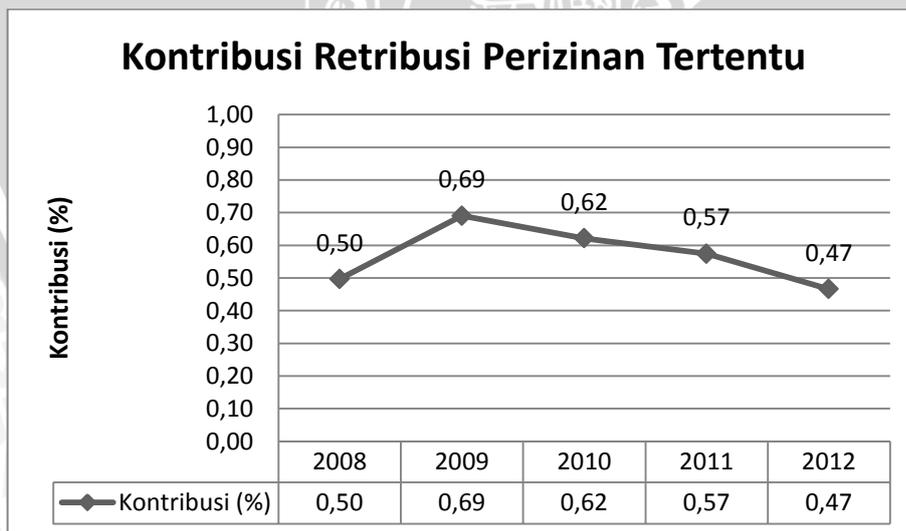
**c. Kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode tahun 2008-2012.**

Data kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar selama 5 tahun terakhir, yaitu periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel dan grafik persentase sebagai berikut:

**Tabel 23. Kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	Realisasi pendapatan asli daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2008	202.707.037	40.809.908.439	0,50	Sangat Kurang
2009	275.092.661	39.860.842.246	0,69	Sangat Kurang
2010	296.397.225	47.690.974.775	0,62	Sangat Kurang
2011	301.878.607	52.598.069.707	0,57	Sangat Kurang
2012	296.428.281	63.621.643.039	0,47	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah



**Gambar 9. Grafik persentase kontribusi retribusi perizinan tertentu Kota Blitar periode 2008-2012**

Berdasarkan tabel 23 dan grafik persentase kontribusi retribusi pada gambar 9 tersebut dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012 sangat rendah. Persentase kontribusi yang rendah ini dikarenakan kurangnya penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah terkait retribusi perizinan tertentu, seperti yang disampaikan oleh Kepala bidang pendapatan Bapak Hari Wahyudi sebagai berikut:

“Kota Blitar yang merupakan salah satu kota kecil di Jawa Timur jarang memperoleh penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi perizinan tertentu, misalnya retribusi izin gangguan yang dipungut ketika ada pihak atau badan yang mengadakan kegiatan atau acara yang mengandung bahaya misalnya konser band terkenal yang mengundang banyak penonton. Sebagai kota kecil dapat diketahui bahwa Kota Blitar jarang diadakan konser band terkenal dalam waktu 1 tahun.”

Persentase kontribusi retribusi daerah merupakan ukuran seberapa besar sumbangan atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Persentase kontribusi retribusi daerah secara keseluruhan baik retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha maupun retribusi perizinan tertentu kurang dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dan tingkat kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi perlu ditingkatkan khususnya dalam hal penerimaan retribusi daerah agar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat dan dapat dirasakan guna memenuhi kepentingan daerah khususnya Kota Blitar.

#### **4. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Pemungutan dan penerimaan retribusi daerah tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar melainkan diserahkan kepada dinas-dinas terkait seperti dinas perhubungan, dinas pasar, dinas kesehatan dan dinas pariwisata. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hari Wahyudi selaku Kepala bidang pendapatan, yaitu:

“Pelaksanaan teknis pemungutan dan penerimaan retribusi daerah dilakukan oleh dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan retribusi yang bersangkutan, misalnya retribusi parkir dipungut oleh dinas perhubungan, retribusi pasar dipungut oleh dinas pasar, begitu juga dengan retribusi yang lainnya. Kemudian hasilnya disetorkan kepada DPKD untuk dikelola sebagai pendapatan asli daerah untuk kepentingan daerah.”

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang didapat dari penggalan potensi-potensi yang dimiliki daerah khususnya Kota Blitar sehingga dapat memberi kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah.

Bapak Hari Wahyudi selaku Kepala bidang pendapatan menjelaskan bahwa:

“Sumber pendapatan asli daerah sebelum adanya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan terbesar diperoleh dari retribusi daerah. Setelah adanya undang-undang tersebut sumber pendapatan asli daerah terbesar diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”

Besarnya realisasi penerimaan retribusi daerah salah satunya dipengaruhi oleh penentuan target penerimaan retribusi daerah tiap tahunnya yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hari Wahyudi selaku Kepala bidang pendapatan sebagai berikut:

“Penentuan target retribusi daerah dapat dilihat dari pengalaman masa lalu atau dengan melihat target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya, dengan prediksi serta asumsi dari pertumbuhan penerimaan tiap tahun ditambah kurang lebih 10% dari rata-rata selisih penerimaan selama 2 tahun terakhir. Dasar yang menjadi pedoman dalam menentukan target tahun berikutnya adalah Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.”

Terdapat pula hambatan-hambatan yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan retribusi, antara lain kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman wajib retribusi dalam membayar retribusi dan mengenai peraturan pembayaran retribusi, kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah daerah dan kurangnya tingkat kedisiplinan petugas pemerintah serta kurangnya jumlah tenaga teknis pemungutan dari pihak pemerintah. Dalam mengatasi hambatan tersebut pemerintah telah melakukan beberapa langkah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hari Wahyudi sebagai berikut:

“Pemerintah telah melakukan beberapa langkah guna mengatasi hambatan-hambatan terkait penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara lain pelaksanaan sosialisasi dan pemberian terkait kewajiban membayar retribusi daerah serta perbaikan sistem pemungutan.”

Realisasi yang dicapai retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 memang mengalami fluktuasi dan masih terdapat realisasi yang belum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi penerimaan tersebut masih dapat tertutupi oleh penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya, sehingga realisasi pendapatan asli daerah dapat mencapai target

yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu:

a. Intensifikasi merupakan usaha pemerintah dalam memperbesar jumlah penerimaan atau pendapatan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat dan teliti guna meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Usaha yang dilakukan pemerintah Kota Blitar antara lain:

1. Melakukan perbaikan sistem dan peraturan dalam pemungutan retribusi daerah.
2. Melakukan pendataan terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerah.
3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi.
4. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui pelatihan kerja.

b. Ekstensifikasi merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan dengan cara mencari, menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Bapak Hari Wahyudi selaku Kepala bidang pendapatan menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan pemerintah Kota Blitar ialah dengan melakukan pendataan terhadap wajib retribusi dan objek retribusi yang dimiliki Kota Blitar serta melakukan penambahan objek-objek retribusi baru dengan dasar dan pedoman yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah